LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TOBA

|  |  |
| --- | --- |
| NOMOR : | TAHUN 2022 |
| TANGGAL : | JULI 2022 |
| TENTANG : | PETA JALAN PELAKSANAAN ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA | |

1. **PENDAHULUAN.**
2. **Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah.**
   1. **Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.**

Pertumbuhan ekonomi yang menoreh hasil positif menjadi momentum Pemerintah Daerah Kabupaten Toba untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian dan fiskal daerah. Hal ini dilakukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan inovasi-inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

* 1. **Perkembangan Penerimaan Asli Daerah**

Penerimaan Kabupaten Toba dalam 4 (empat) tahun terakhir bersifat fluktuatif dimana pada tahun 2018 Penerimaan Kabupaten Toba sebesar Rp 994.826.109.404,20 (Sembilan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan ribu empat ratus empat rupiah dua puluh sen), Tahun 2019 sebesar Rp 1.075.193.000.279,06 ( Satu triliun tujuh puluh lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah enam sen), Tahun 2020 sebesar Rp 1.006.299.214.620,28 (Satu triliun enam milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh rupiah dua puluh delapan sen) dan Tahun 2021 sebesar Rp 1.078.273.724.817,12 (Satu triliun tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah dua belas sen).

Tabel 1

* 1. **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah.**

Kabupaten Toba menfokuskan penggunaan anggaran pada pemulihan sektor UMKM, pertanian dan pengembangan sektor pariwisata sebagai upaya memulihkan perekonomian Kabupaten Toba. Anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Membangun kawasan wisata baru.
2. Merevitalisasi kawasan wisata unggulan
3. Memberikan pelatihan kepada UMKM
4. Memberikan bantuan bibit tanaman kepada petani.

Pemerintah Kabupaten Toba berharap melalui sektor UMKM, pertanian dan pariwisata selain mampu memulihkan perekonomian juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba.

1. **Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.**

Implementasi Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Toba saat ini sudah mulai giat dilaksanakan dan terus dikembangkan. Hal itu dapat dilihat dari ditetapkannya Intstruksi Bupati Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Dalam hal Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Toba telah melaksanakan transaksi pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Aparatur Sipil Negara) secara non tunai. Demikian juga untuk transaksi belanja operasional dengan nilai transaksi 10 (sepuluh) juta keatas telah dilaksanakan secara non tunai yang dibayarkan langsung ke rekening pihak ketiga. Dalam hal Penerimaan/Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Toba telah membuka sistem pembayaran secara non tunai dengan kanal-kanal pembayaran yang tersedia melalui *Mobile Banking*, ATM, OVO, GOPAY, dan lain-lain untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Toba masih terus mengembangkan sistem pembayaran secara non tunai untuk Penerimaan/Pendapatan Daerah lainnya.

Tabel 2

Gambaran Transaksi Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis | Gambaran Transaksi Non Tunai | | |
| Tunai | Semi Digital | Digital |
| 1 | Pajak Hotel |  | 100 % |  |
| 2 | Pajak Restoran |  | 100 % |  |
| 3 | Pajak Hiburan |  | 100 % |  |
| 4 | Pajak Relame |  | 100 % |  |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan |  | 100 % |  |
| 6 | Pajak Air Tanah |  | 100 % |  |
| 7 | Pajak MBLB |  | 100 % |  |
| 8 | Pajak PBB-P2 |  | 65 % | 35 % |
| 9 | BPHTB |  | 100 % |  |
| 10 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 100 % |  |  |
| 11 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 100 % |  |  |
| 12 | Retribusi Parkir di tepi jalan umum | 100 % |  |  |
| 13 | Retribusi Pelayanan Pasar | 96 % | 4 % |  |
| 14 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 100 % |  |  |
| 15 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 100 % |  |  |
| 16 | Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan | 100 % |  |  |
| 17 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 100 % |  |  |
| 18 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 100 % |  |  |
| 19 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan |  | 100 % |  |

1. **Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah.**

Menurut letak geografis Kabupaten Toba merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara dengan ketinggian antara 900 sampai 2.200 meter di atas permukaan laut. Secara Administratif Kabupaten Toba terdiri dari 16 Kecamatan, yang terdiri dari 231 Desa dan 13 Kelurahan, dimana Luas wilayah daratan Kabupaten Toba sekitar 202.180 Ha.

Secara Demografis Jumlah Penduduk Kabupaten Toba pada tahun 2020 sebesar 206.000 jiwa (hasil sensus penduduk 2020). Lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap perekonomian Kabupaten Toba terdiri dari Pertanian, Perikanan dan Perdagangan.

1. **ASSESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH.**
2. **Gambaran Infrastruktur Telekomunikasi Informasi.**

Tower jaringan internet pada dasarnya telah tersebar di wilayah Kabupaten Toba, namun masih banyaknya permukiman masyarakat di daerah pedalaman mengakibatkan belum semua wilayah di Kabupaten Toba memiliki akses internet. Saat ini dari 16 Kecamatan dan 244 Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten Toba, masih terdapat 35 desa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan yang belum memiliki akses internet (*zona* *blankspot*). Namun untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Toba sudah tercakup jaringan 4G. Adapun provider yang menyediakan jaringan ini adalah Telkom, Telkomsel, Indosat, Tre3, Smartfren, XL (Axis), ICON dan MVnet. Jaringan internet yang terdapat di Kabupaten Toba memiliki kecepatan jaringan sebesar 600 Mbps.

1. **Gambaran Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).**
   1. **Produk Layanan Non Tunai yang dimiliki Bank RKUD.**

* Internet Banking adalah layanan transaksi realtime online melalui computer, tablet, handphone atau laptop.
* Mobile Banking adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau ssmartphone.
* Sumutlink adalah layanan Bank Sumut dengan konsep sharing fee dengan agen yang akan bekerjasama dengan Bank Sumut
* Virtual Account adalah metode pembayaran digital melalui akun virtual yang dibuat khusus untuk masing-masing pelanggan . Untuk setiap transaksi , pelanggan akan dirujuk ke Virtual Account tersebut untuk melakukan pembayaran dan terdiri dati nomor ID pelanggan (customer ID) yang unik bagi setiap pelanggan.melakukan pembayaran.
* Payment point adalah transaksi pembayaran yang dilakukan melalui seluruh unit kerja Bank Sumut, loket-loket khusus pembayaran payment point, dan E-Banking (ATM, Mobile Banking, Internet Banking).
* Cash Recycling Machine (CRM) adalah Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh Nasabah Bank Sumut untuk melakukan penarikan rekening sendiri serta penyetoran ke rekening sendiri serta penyetoran ke rekening orang lain. Selain penyetoran Uang Tunai, CRM Juga berfungsi untuk melakukan transfer, pembayaran dan pembelian.
* Mesin ATM adalah Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dipergunakan untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening Bank Sumut, rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama, jaringan Prima.
* Mobil Kas Keliling Bank adalah layanan untuk menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan yang mudah, cepat serta aman.
* QRIS (QR Code Indonesia Standart) adalah layanan transaksi Non Tunai dalam bentuk QR standart dari Bank Indonesia yang ada dalam menu Bank Sumut Mobile. QEIS Bank Sumut dapat digunakan untuk srana pembayaran dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia yang berlogo QRIS GPN yang diterbitkan oleh Perbankan/fintech.
* Transfer For Payment adalah layanan Bank Sumut dimana transaksi transfer dilakukan dengan menggunakan rekening Virtual Account (VA).
* Cash Management System (CMS) adalah layanan internet banking Bank Sumut untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belanja Perangkat Daerah secara real time oleh bendahara.
* Payroll Package adalah layanan pembayaran gaji dimana pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening pemberi gaji ke rekening penerima gaji.
* SP2D Online adalah integrasi system keuangan pemerintah daerah dengan system bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara online antar system.
  1. **Jumlah Infrastruktur Bank RKUD.**

Tabel 3

Infrastruktur Bank RKUD (Bank Sumut)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Kantor | Tahun 2021 |
| 1 | Unit Kantor | 196 |
| 2 | Kantor Cabang | 43 |
| 3 | Kantor Cabang Pembantu | 116 |
| 4 | Kantor Kas | 37 |
| 5 | Payment Point | 76 |
| 6 | Mobil Kas | 33 |
| 7 | Anjungan Tunai Mandiri | 337 |

* 1. **Kerjasama yang dimiliki Bank RKUD Dalam Layanan Non Tunai**

Bank Sumut juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memperluas jangkauan pembayaran digital, yaitu fintech dan e-commerce. Dengan demikian pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak dan wajib retribusi yeng berdomisili di luar wilayah Kabupaten Toba sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir langsung ke kantor layanan Bank Sumut.

1. **Gambaran Pemerintah Kabupaten Toba.**
   1. **Kebijakan/regulasi/program Kabupaten Toba dalam mendukung digitalisasi / SPBE dan ETPD.**

Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk mendukung digitalisasi dan elektronifikasi dengan menetapkan beberapa regulasi pendukung antara lain :

1. Sebagai amanat Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Toba melalui Instruksi Bupati Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
2. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
3. Keputusan Bupati Toba Nomor 427 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022.
   1. **Aplikasi atau system berbasis teknologi yang telah dibangun dalam mendukung digitalisasi dan elektronifikasi.**
4. Smart City, pembangunan dan implementasi “Smart City” bertujuan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Toba yaitu “Unggul dan Bersinar”
5. Aplikasi Sismiop, Aplikasi e-BPHTB dan Aplikasi e-Pendapatan bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Bank Sumut sebagai upaya digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Bekerjasama dengan Institut Teknologo Del untuk mendigitalisasi pelaku UMKM melalui program “Aplikasi Rumah Kreatif Toba” yang meliputi pemasaran digital sebagai upaya meningkatkan omset penjualan UMKM.
7. **Tingkat Literasi Non Tunai dan Digital Masyarakat.**
8. Tingkat Literasi Non Tunai masyarakat Kabupaten Toba masih kurang, terlihat dari masih rendahnya penggunaan alat pembayaran non tunai seperti kartu kredit, kartu debet, uang elektronik dan QRIS oleh masyarakat di tempat-tempat perbelanjaan, restoran, café, hotel serta pembayaran pajak dan retribusi daerah. Terutama literasi non tunai di daerah pedesan sangat perlu ditingkatkan, karena masyarakat pedesaan masih belum terbiasa menggunakan alat pembayaran non tunai. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai sebenarnya dapat dijadikan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pedesaan.
9. Tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Toba secara umum masih perlu ditingkatkan, Sebenarnya 90 % masyarakat di Kabupaten Toba sudah mengakses internet dan menggunakan internet pada kegiatan sehari-hari, namun penggunaan internet ini hanya sebatas mengakses informasi dan bermedia sosial bukan sebagai penggunaan yang produktif. Masih diperlukan upaya-upaya memanfaatkan teknologi digital terutama di sektor produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. **KENDALA DAN PERMASALAHAN.**
11. Gambaran Permasalahan dari Sisi Kanal dan/atau Instrumen Pembayaran Non Tunai.

Tabel 4

Gambaran Permasalahan dari Sisi Kanal dan/atau Instrumen Pembayaran Non Tunai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Kanal | Aspek Masalah | | | |
| Pemda | Masyarakat | Bank Sumut | Infrastruktur |
| 1 | QRIS | 1. Untuk Pajak, sosialisasi atas pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran non tunai kepada Wajib Pajak belum maksimal. 2. Untuk retribusi belum seluruhnya memiliki QRIS sebagai alternative pembayaran non tunai dan juga sosialisasi ke masyarakat belum optimal | 1. Masyarakat belum banyak yang memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran 2. Masih menyukai membawa uang tunai 3. Belum atau tidak memiliki mobile banking dan atau e-wallet 4. Keengganan membayar secara digital karena jumlah rupiah terlalu kecil | 1. Pembuatan QRIS untuk pajak dan retribusi daerah memerlukan waktu dan kerjasama dengan vendor OPD terkait untuk integrasi database 2. Sosialisasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran belum maksimal | Penggunaan QRIS harus menggunakan jaringan internet |
| 2 | ATM |  | Keengganan untuk memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank | 1. ATM Bank Sumut belum tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Daerah 2. Perlu biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM | Penggunaan ATM membutuhkan jaringan internet |
| 3 | Mobile Banking |  | 1. Masyarakat belum seluruhnya memiliki mobile banking 2. Banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan mobile banking | 1. Prosentase masyarakat yang memiliki mobile banking masih rendah 2. Penawaran untuk mengunduh mobile banking kepada masyarakat belum optimal | Penggunaan Mobile Banking membutuhkan jaringan internet |
| 4 | Uang Elektronik |  | 1. Belum terbiasa bertransaksi menggunakan uang elektronik 2. Uang eletronik dirasa sedikit merepotkan karena harus mengisi Top up, sehingga harus datangke ATM/layanam non tunai lainnya | Bank Sumut belum menerbitkan uang elektronik bagi WP atau WR yang bersifat pribadi (close loop) | Penggunaan Uang Elektronik membutuhkan jaringan internet |

1. **Gambaran Permasalahan dari sisi Jenis Pendapatan Daerah**

Tabel 5

Gambaran Permasalahan dari sisi Jenis Pendapatan Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pendapatan | Aspek Masalah | | | |
| Pemda | Masyarakat (WP/WR/Rekanan) | Bank Sumut | Infrastruktur |
| 1 | Pajak Hotel | Aplikasi yang belum tersedia | Pemilik Hotel bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 2 | Pajak Restoran | Aplikasi yang belum tersedia | Pemilik Restoran bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 3 | Pajak Hiburan | Aplikasi yang belum tersedia | Pemilik Hiburan bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 4 | Pajak Reklame | Aplikasi yang belum tersedia | Pemilik Reklame bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Pajak Penerangan Jalan bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 6 | Pajak Air Tanah | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Pajak Air Tanah bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 7 | Pajak MBLB | Aplikasi yang belum tersedia | Pemilik Tangkahan bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 8 | PBB-P2 |  | Masyarakat lebih yakin dengan adanya stempel bank |  | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 9 | BPHTB |  | Wajib BPHTB bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 10 | Retribusi Pelayanan kesehatan | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 11 | Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 12 | Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 13 | Retribusi Pelayanan Pasar | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 14 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain |  |
| 15 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain |  |
| 16 | Retribusi Tempat Penginapan/Villa dan Pesanggrahan | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 17 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 18 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |
| 19 | Retribusi IMB/PBG | Aplikasi yang belum tersedia | Wajib Retribusi bukan nasabah Bank Sumut | Belum bekerjasama dengan bank lain | Penggunaan Aplikasi membutuhkan jaringan internet |

Melihat permasalahan di atas, maka pemecahan masalah yang akan dilakukan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Toba disusun rencana penyelesaian masalah sebagai berikut :

**Faktor Pemerintah**

1. Membangun Basis Data Pajak dan Retribusi, serta penerbitan kode bayar untuk mendukung pengembangan QRIS dinamis sebagai salah satu alternative pembayaran serta kanal pembayaran digital lainnya seperti mobile dan internet banking.
2. Penjajakan kemungkinan pemanfaatan e-commerce dalam semua penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta penggunaan e-money sebagai sarana pembayaran.

**Faktor Masyarakat**

1. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus serta mengedukasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung tentang tata cara penggunaan kanal digital seperti QRIS dan Mobile Banking (media sosial, website, Video).
2. Mempercepat Literasi Digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan transaksi keuangan secara digital.
3. Melakukan sosialisasi kepada generasi milenial yang paham teknologi untuk menularkan dan mengedukasi generasi senior dalam pemanfaatan kanal digital.

**Faktor Bank RKUD**

1. Teller dan Agen Bank secara terus-menerus menginformasikan dan mengarahkan masyarakat untuk menggunakan kanal digital seperti QRIS dan Mobile banking dalam bertansaksi.
2. Mengembangkan aplikasi e-pendapatan dan e-retribusi yang terintegrasi dengan system perbankan.
3. Melaksanakan kerjasama dengan bank lain dan pihak lain untuk penyediaan kanal pembayaran non tunai yang lebih beragam.

**Faktor Infrastruktur**

1. Penyediaan jaringan di lokasi penerapan elektronifikasi

Dari gambaran peta permasalahan di atas, bahwa kolaborasi dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Bank Sumut Sebagai Bank RKUD sangat diperlukan guna mempercepat proses elektronifikasi transaksi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Toba.

1. **RENCANA KERJA TP2DD**

Tabel 6

Rencana Kerja TP2DD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian Kegiatan | Penanggungjawab |
| 1 | Membangun Aplikasi e-Pendapatan untuk Pajak Daerah | BPPD dan Bank RKUD |
| 2 | Membangun Aplikasi e-Retribusi untuk Retribusi Daerah | BPPD, seluruh PD Pengelola Retribusi Daerah dan Bank RKUD |
| 3 | Penyediaan jaringan di lokpasi elektronifikasi | Bank Indonesia dan Bank RKUD |
| 4 | Ujicoba Pemakaian QRIS dan Mobile Banking | Bank Indonesia, Bank RKUD dan PD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| 5 | Sosialisasi dan Edukasi Pemakaian QRIS, Mobile Banking dan Uang Elektronik kepada wajib pajak dan wajib retibusi | Bank RKUD dan PD Pengelola Pajak dan Retribusi |
| 6 | Penjajakan kerjasama dengan Pihak Jasa Perbankan | Bank RKUD |
| 7 | Pembangunan Aplikasi kode bayar terpadu | Bank Indonesia, Bank RKUD, BPPD dan Dinas Kominfo |

1. **TARGET TP2DD**

Dengan memperhatikan gambaran transaksi dan gambaran permasalahan serta Rencana Kerja TP2DD dan fakta lainnya, berikut Target TP2DD dari masing-masing jenis pendapatan daerah beserta penangungjawab dari masing-masing target dimaksud :

Tabel 7

Target TP2DD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Pendapatan | Target TP2DD | | | | | | | | | | | | | | | Penanggungjawab |
| 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | BPPD |
| Tunai | Semi digital | Digital | Tunai | Semi digital | Digital | Tunai | Semi digital | Digital | Tunai | Semi digital | Digital | Tunai | Semi digital | Digital |  |
| 1 | Pajak Hotel |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 2 | Pajak Restoran |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 3 | Pajak Hiburan |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 4 | Pajak Reklame |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 5 | PPJ |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 6 | Pajak MBLB |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 7 | PAT |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 8 | PBB P2 |  | 85 % | 15 % |  | 65 % | 35 % |  | 55 % | 45 % |  | 10 % | 90% |  |  | 100% | BPPD |
| 9 | BPHTB |  | 100 % |  |  | 90 % | 10 % |  | 60 % | 40 % |  | 20 % | 80% |  |  | 100% | BPPD |
| 10 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 100% |  |  | 100% |  |  | 90% | 10 % |  | 80 % | 20 % |  | 10 % | 40 % | 50 % | RSUD Porsea |
| 11 | Retribusi Persampahan dan Kebersihan | 100% |  |  | 100% |  |  | 60% | 30% | 10% | 40% | 40% | 20% |  | 40% | 60% | Dinas Lingdup |
| 12 | Retribusi Parkir di tepi jalan umum | 100% |  |  | 100% |  |  | 70% | 20% | 10% | 40% | 40% | 20% |  | 35% | 65% | Dishub |
| 13 | Retribusi Pelayanan Pasar | 97 % |  | 3% | 95 % |  | 5% | 80% |  | 20% | 60% |  | 40% |  | 20% | 80% | Dinas Koperindag |
| 14 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 100% |  |  | 100% |  |  | 60% | 20% | 20% | 40% | 30% | 30% |  | 40% | 60% | Dishub |
| 15 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 100% |  |  | 100% |  |  | 60% | 40% |  | 40% | 50% | 10% |  | 50% | 50% | PUTR, Tarukim, Dinas Pertanian |
| 16 | Retribusi Tempat Penginapan / Villa | 100% |  |  | 100% |  |  | 60% | 40% |  | 40% | 50% | 10% |  | 30% | 70% | Sekretariat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan |
| 17 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 100% |  |  | 100% |  |  | 90% |  | 10% | 55% | 15% | 30% |  | 40% | 60% | Dinas Pariwisata |
| 18 | Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah | 100% |  |  | 100% |  |  | 60% | 40% |  | 40% | 50% | 10% |  | 35% | 65% | Dinas Pertanian |
| 19 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 70% | 30% |  | 50% | 50% |  | 20% | 80% | PUTR, Dinas PPTSP dan Ketenagakerjaan |

*Catatan : Semi digital adalah melalui teller dan agen*

**KEPALA BADAN,**

**Ir. JAMES SIMANJUNTAK, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP.19620328 199108 1 001**

**KEPALA BADAN,**

**Ir. JAMES SIMANJUNTAK, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP.19620328 199108 1 001**

**KEPALA BADAN,**

**Ir. JAMES SIMANJUNTAK, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP.19620328 199108 1 001**

**KEPALA BADAN,**

**Ir. JAMES SIMANJUNTAK, MM**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP.19620328 199108 1 001**

|  |  |
| --- | --- |
| Salinan sesuai dengan aslinya  KEPALA BAGIAN HUKUM  SETDAKAB TOBA  LUKMAN J. SIAGIAN, SH, MH  PEMBINA TK. I  NIP. 19750804 200502 1 002 | BUPATI TOBA  Cap/dto  POLTAK SITORUS |